



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp/Fax 0511-6701738
Marabahan 70513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 188.45/030/DISBUNNAK/2020**

TENTANG

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 188.45/024/Disbunnak/2018 tentang Penetapan Pohon Kinerja (Cascading) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- c. bahwa dengan adanya bencana nasional *Corona Virus Disease* (COVID-19) berdampak terhadap kemampuan anggaran pemerintah daerah pada setiap SKPD yang mengakibatkan terjadinya penurunan capaian target kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease - 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 1 Juli 2020

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	<p>Makna Indikator : Peningkatan produksi perkebunan merupakan indikasi dari peningkatan produksi perkebunan yang terdiri dari 3 (tiga) komoditas utama yakni: Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa</p> <p>Alasan Pemilihan : Tugas dan fungsi teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan salah satunya adalah menyediakan produksi perkebunan. Komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa dalam merupakan komoditas utama yang dikembangkan oleh masyarakat (pekebun) Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Perhitungan Indikator : Peningkatan Produksi dihitung dengan cara membandingkan peningkatan produksi antara tahun ini dengan tahun lalu dikali 100% dari 3 (tiga) komoditas utama yang dijadikan indikator (kelapa sawit, karet dan kelapa</p>	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Bidang Perkebunan Disbunnak

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			dalam) di wilayah Kabupaten Barito Kuala		
2.	Meningkatnya populasi dan produksi peternakan	Prosentase peningkatan populasi peternakan	<p>Makna Indikator : Peningkatan populasi ternak merupakan indikasi dari peningkatan populasi setiap jenis ternak yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Populasi ternak sangat penting untuk mengetahui kinerja teknis SKPD dan secara nasional digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan teknis lainnya</p> <p>Alasan Pemilihan : Populasi ternak digunakan untuk menghitung kebijakan pemerintah seperti ketersediaan daging ternak, ketersediaan bibit dan kebijakan lainnya. Populasi ternak sangat penting dalam mencapai produksi ternak yang optimal pada suatu kawasan pengembangan</p>	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Bidang Produksi Peternakan Disbunnak

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Peningkatan populasi dihitung dengan cara membandingkan peningkatan populasi ternak sapi potong dan ternak kerbau antara tahun berjalan dengan tahun lalu dikali 100% dari 2 (dua) komoditas utama yang dijadikan indikator (sapi potong dan kerbau) dalam dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala</p>		
		<p>Prosentase peningkatan produksi daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</p>	<p>Makna Indikator : Peningkatan produksi daging ternak yang ASUH merupakan indikasi dari peningkatan produksi daging yang memenuhi standar ASUH setiap jenis ternak dalam waktu satu tahun yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Produksi Daging ternak yang ASUH sangat penting untuk mengetahui kinerja teknis SKPD dan secara nasional produksi daging ternak juga digunakan sebagai dasar mengukur <i>suplay and demand</i> dan kecukupan</p>	<p>Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Bidang Keswan dan Kesmavet Disbunnak</p>

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>penyediaan daging ternak</p> <p>Alasan Pemilihan : Produksi daging ternak sangat penting diketahui dan diupayakan untuk memberikan kepastian ketersediaan daging ternak pada suatu daerah. Produksi daging menjadi tolok ukur kemampuan suatu daerah untuk dapat dikatakan swasembada daging. Produksi daging yang memenuhi standar ASUH merupakan salah satu alat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa daging ternak yang dikonsumsi Aman (bebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya), Sehat (bebas dari cemaran penyakit menular berbahaya), Utuh (tidak dicampur dengan bahan/ daging ternak lainya dan Halal (berasal dari penyembelihan yang menerapkan teknik penyembelihan secara Islami)</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Peningkatan produksi daging ternak yang ASUH dihitung dengan cara membandingkan peningkatan produksi daging ternak sapi potong, ternak kerbau dan ternak ayam potong antara tahun berjalan dengan tahun lalu dikali 100% dari 3 (tiga) komoditas utama yang dijadikan indikator (sapi potong, kerbau dan ayam potong) dalam dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala</p>		
3.	Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan	Prosentase peningkatan produk olahan perkebunan yang diterima pasar	<p>Makna Indikator : Prosentase peningkatan produk olahan perkebunan yang diterima pasar merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh mana produk olahan perkebunan yang diproduksi petani di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima oleh konsumen. Indikator ini juga menunjukan daya saing produk yang dihasilkan oleh petani</p>	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Bidang Perkebunan Disbunnak

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk. Untuk menilai kemampuan produk yang dihasilkan dalam persaingan di pasar dapat diukur dengan mengetahui prosentase produk yang dapat diterima pasar</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase peningkatan produk olahan perkebunan yang diterima pasar dihitung dengan menghitung jumlah jenis produk olahan perkebunan yang terdapat dipasar pada tahun berjalan dibagi jumlah jenis produk yang ada dipasaran tahun sebelumnya dikali 100%</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
		<p>Prosentase peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar</p>	<p>Makna Indikator : Prosentase peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh mana produk olahan peternakan yang diproduksi peternak di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima oleh konsumen. Indikator ini juga menunjukkan daya saing produk yang dihasilkan oleh peternak</p> <p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk. Untuk menilai kemampuan produk yang dihasilkan dalam persaingan di pasar dapat diukur dengan mengetahui prosentase produk yang dapat diterima pasar</p>	<p>Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Bidang Produksi Peternakan Disbunnak</p>

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar dihitung dengan menghitung jumlah jenis produk olahan peternakan yang terdapat dipasar pada tahun berjalan dibagi jumlah jenis produk yang ada dipasaran tahun sebelumnya dikali 100%</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jabatan : **Sekretaris Dinas**

Tugas : Membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Perkebunan dan Peternakan
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang perkebunan, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- f. Menyelia (melakukan supervise) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan

- g. Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi perkebunan, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- i. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makna Indikator : Indikator nilai SAKIP SKPD merupakan pendukung dari seluruh indikator sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan. Nilai SAKIP SKPD memberikan makna sampai sejauh mana capaian kinerja SKPD yang didukung oleh capaian masing-masing pejabat yang ada pada	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>SKPD memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran SKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai SAKIP SKPD merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh mana kinerja SKPD dicapai melalui proses SAKIP yang dilaksanakan oleh seluruh sumber daya SKPD. Nilai SAKIP SKPD juga akan berpengaruh terhadap nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator Nilai SAKIP SKPD diperoleh dari hasil penilaian Laporan Kinerja SKPD oleh APIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala</p>		
2.	Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas	Prosentase jumlah dokumen perencanaan yang telah direviu tepat waktu	<p>Makna Indikator : Indikator dokumen perencanaan yang telah direviu tepat waktu merupakan indikator untuk menunjukkan kualitas dan tingkat kepatuhan SKPD terhadap</p>	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>komitmen perencanaan yang berkualitas. Dalam Indikator ini dokumen yang diukur meliputi (Renstra SKPD, RKA, RKA-P, RENJA, DPA dan DPA-P). Dokumen perencanaan yang baik harus direviu oleh Tim Inspektorat Daerah, Bappelitbang atau tim lain yang ditunjuk agar dokumen perencanaan SKPD yang dibuat benar-benar berkualitas dan diselesaikan tepat waktu</p> <p>Alasan Pemilihan : Dokumen perencanaan akan menentukan hasil akhir yang akan diharapkan. Oleh karena itu perencanaan yang berkualitas harus melibatkan instansi lain untuk melakukan reviu sehingga menghasilkan perencanaan yang transparan dan akuntabel. Indikator ini juga akan mempengaruhi terhadap nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase dokumen perencanaan yang direviu dan tepat waktu dihitung dengan menghitung jumlah perencanaan yang telah direviu dan diselesaikan tepat waktu penyelesaiannya dibagi jumlah dokumen perencanaan yang ditargetkan dikali 100%</p>		
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Prosentase penyelesaian laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<p>Makna Indikator : Indikator penyelesaian laporan keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu merupakan indikator untuk menunjukkan kualitas dan tingkat kepatuhan SKPD terhadap komitmen pemerintahan yang bersih (<i>good governance</i>). Inidikator ini juga merupakan pendukung dari seluruh indikator sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan. Penyelesaian laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu memberikan makna sampai sejauh mana capaian kinerja dan</p>	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>keuangan SKPD dapat disajikan secara transparan, dan akuntabel</p> <p>Alasan Pemilihan : Penyelesaian laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh laporan keuangan SKPD dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Indikator ini juga sangat berpengaruh terhadap nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator penyelesaian laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dihitung dengan menghitung jumlah laporan keuangan yang diselesaikan dan tingkat ketepatan waktu penyelesaiannya dibagi target dikali 100%</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesekretariatan	Prosentase pelayanan kepegawaian yang diberikan	<p>Makna Indikator : Indikator prosentase layanan kepegawaian yang diberikan oleh kesekretariatan kepada karyawan/ti SKPD adalah indikator untuk mengukur sejauh mana pelayanan kepegawaian yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan ASN yang ada</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase layanan kepegawaian yang diberikan diambil sebagai indikator karena indikator ini menjadi kunci keberhasilan pelayanan kesekretariatan SKPD</p>	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Subbag. Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase layanan kepegawaian yang diberikan dihitung dengan membandingkan antara layanan yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah layanan yang ditargetkan dikali 100%</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset**

Tugas : Membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan

b. Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Perkebunan dan Peternakan

c. Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan perencanaan kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan,

- penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
- d. Melaksanakan secara operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - e. Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta menyusun laporan keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan
 - f. Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian perencanaan, keuangan, dan aset
 - g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - h. Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - i. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan

perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian perencanaan, keuangan, dan aset

- j. Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan penyusunan dokumen SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD yang diselesaikan tepat waktu	Makna Indikator : Indikator jumlah dokumen SAKIP SKPD yang diselesaikan tepat waktu merupakan pendukung dari indikator nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dokumen SAKIP SKPD terdiri dari Renstra, IKU, PK, Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Dokumen SAKIP SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Instansi Pemerintah</p> <p>Alasan Pemilihan : Jumlah dokumen SAKIP SKPD yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh mana kinerja SKPD dicapai melalui proses SAKIP yang dilaksanakan oleh seluruh sumber daya SKPD. Jumlah dokumen SAKIP SKPD yang diselesaikan tepat waktu menjadi faktor utama penilaian SAKIP SKPD, tanpa adanya dokumen SAKIP yang diselesaikan tidak mungkin ada nilai SAKIP-SKPD</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah dokumen SAKIP SKPD yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari jumlah dokumen SAKIP yang dapat diselesaikan tepat waktu</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
2.	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan SKPD melaksanakan kinerja menyelesaikan dokumen perencanaan dan tingkat kepatuhan SKPD terhadap komitmen perencanaan yang berkualitas. Dalam indikator ini dokumen yang diukur meliputi (Renstra SKPD, RKA, RKA-P, Renja, DPA dan DPA-P)</p> <p>Alasan Pemilihan : Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator alat ukur untuk menilai kemampuan kinerja penyusunan perencanaan tepat waktu. Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu akan memberikan kontribusi bagi hampir semua indikator sasaran SKPD. Indikator ini juga akan</p>	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Dokumen Renstra SKPD, RKA, RKA-P, Renja, DPA dan DPA-P

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>mempengaruhi terhadap nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan menghitung jumlah dokumen perencanaan yang telah diselesaikan tepat waktu penyelesaiannya</p>		
3.	Melaksanakan penyusunan data realisasi fisik dan keuangan SKPD	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan format 1 dan format 2	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan format 1 dan format 2 merupakan indikator untuk menunjukkan sampai sejauh mana laporan realisasi fisik baik format 1 dan format 2 dapat disajikan tepat waktu dan akuntabel</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan format 1 dan format 2 merupakan indikator</p>	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi kinerja seluruh Pejabat SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>yang menunjukkan sampai sejauh laporan realisasi fisik keuangan SKPD dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Indikator ini juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan format 1 dan format 2 diperoleh dengan menghitung jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang diselesaikan dan tingkat ketepatan waktu penyelesaiannya</p>		
4.	Melaksanakan penyusunan dokumen Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Catatan atas Laporan Keuangan yang akuntabel yang diselesaikan tepat waktu	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah dokumen Catatan atas Laporan Keuangan yang akuntabel yang diselesaikan tepat waktu adalah indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah-</p>	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi kinerja seluruh Pejabat SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>kaidah akuntabilitas penyajian laporan. Laporan yang dibuat antara lain Neraca, LRA, Aset dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah dokumen Catatan atas Laporan Keuangan yang akuntabel yang diselesaikan tepat waktu diambil sebagai indikator karena indikator ini menjadi kunci keberhasilan perolehan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah dokumen Catatan atas Laporan Keuangan yang akuntabel yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan menghitung jumlah laporan yang dihasilkan sesuai waktu yang ditentukan</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
5.	Melaksanakan penyusunan laporan kinerja SKPD yang akuntabel	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang akuntabel	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang akuntabel adalah indikator untuk mengukur kinerja penyelesaian dokumen laporan kinerja yang sesuai dengan kaidah-kaidah akuntabilitas penyajian laporan. Laporan yang dibuat laporan kinerja SKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang akuntabel diambil sebagai indikator karena indikator ini menjadi kunci keberhasilan perolehan nilai SAKIP SKPD dan merupakan bagian dari penilaian SAKIP Pemerintah Daerah</p>	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi kinerja seluruh Pejabat SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang akuntabel diperoleh dengan menghitung jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel yang dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas : Membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatusahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan pengharagaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan

b. Menyusun rencana program dan rencana sesuai standar operasional rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengelolaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan

- c. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- d. Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- e. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- f. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan

- h. Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- i. Menyusun perencanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian
- j. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada sub bagian umum dan kepegawaian
- k. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani adalah indikator untuk mengevaluasi berapa besar pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani merupakan indikator untuk menilai sampai sejauhmana kinerja SKPD dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani diperoleh dari jumlah dokumen pelayanan yang dapat diselesaikan tepat waktu oleh SKPD</p>	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	Data Kepegawaian SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
2.	Melaksanakan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilayani	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah administrasi perkantoran yang dilayani merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan SKPD melaksanakan kinerja pelayanan perkantoran. Dalam Indikator ini pelayanan yang diukur meliputi (surat menyurat, penyediaan alat tulis kantor, jasa kebersihan, makanan dan minuman)</p> <p>Alasan Pemilihan : Jumlah administrasi perkantoran yang dilayani merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah administrasi perkantoran yang dilayani diperoleh dengan menghitung jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan</p>	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	Data Kepegawaian SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
3.	Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya merupakan indikator untuk menunjukkan sampai sejauh mana kapasitas ASN SKPD yang dapat difasilitasi peningkatan kapasitasnya sebagai ASN</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya merupakan indikator yang menunjukan seberapa besar rasio ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelaksanaan Bintek/ Diklat</p>	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	Data Kepegawaian SKPD

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya diperoleh dengan menghitung jumlah ASN SKPD yang diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Bidang Perkebunan**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perkebunan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perkebunan, yang meliputi program dan kegiatan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan

c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan

d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan

e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan

g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatataan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perkebunan dan peternakan

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja, setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perkebunan dan peternakan

- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perkebunan dan peternakan
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya luas areal perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan merupakan pendukung dari indikator sasaran prosentase peningkatan produksi perkebunan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja seberapa besar produktivitas tanaman sawit, karet dan kelapa pada perkebunan rakyat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Produksi dan produktivitas perkebunan di Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh luas tanaman perkebunan yang ditanam. Hal ini mengingat sampai saat ini tanaman kebanyakan masih belum</p>	Kepala Bidang Perkebunan	Data laporan kinerja seksi bina budidaya perkebunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>mencapai produksi optimal. Dengan peningkatan produktivitas kedepan akan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan areal perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dihitung dengan cara menghitung peningkatan realisasi produksi per hektar tahun sebelumnya/produksi per hektar tahun berjalan dikali 100%. Dihitung untuk tanaman karet, sawit dan kelapa setiap tahun</p>		
2.	Meningkatnya pengendalian hama penyakit	Prosentase Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang diselesaikan	<p>Makna Indikator : Indikator prosentase organisme pengganggu tanaman yang diselesaikan merupakan indikator untuk mengukur kinerja sampai sejauh mana kejadian OPT dapat diselesaikan oleh SKPD. Kejadian gangguan OPT yang akan mempengaruhi indikator SKPD peningkatan produksi perkebunan</p>	Kepala Bidang Perkebunan	Data laporan kinerja seksi bina budidaya perkebunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase organisme pengganggu tanaman yang diselesaikan merupakan indikator yang sangat mempengaruhi indikator sasaran SKPD terutama pada indikator peningkatan produksi perkebunan. Kegagalan penanganan gangguan OPT otomatis akan langsung berakibat pada penurunan produksi perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase organisme pengganggu tanaman yang diselesaikan dihitung dengan cara membandingkan antara kejadian gangguan OPT yang mampu diselesaikan dengan jumlah seluruh kejadian gangguan OPT selama satu tahun dikali 100%</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya kemampuan kelompok dalam akses pasar	Prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan	<p>Makna Indikator : Indikator prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan merupakan indikator untuk mengetahui bagaimana daya saing produk perkebunan dan kemampuan kelompok dalam mengakses pasar</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam usaha agribisnis pemasaran menjadi faktor penting kesuksesan usaha agribisnis. Dengan adanya indikator ini diharapkan dapat semua produk perkebunan akan memperoleh akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani.</p>	Kepala Bidang Perkebunan	Data laporan kinerja seksi bina usaha perkebunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator: Indikator prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan dihitung dengan dihitung dengan cara menghitung jumlah jenis produk perkebunan yang dapat dipasarkan dibagi dengan jumlah jenis produk yang dihasilkan dikali 100%</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Bina Budidaya Perkebunan**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina budidaya perkebunan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina budidaya perkebunan, yang meliputi program dan kegiatan bina budidaya perkebunan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perkebunan
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina budidaya perkebunan
c. Melaksanakan secara operasionalisasi pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diverifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/ bibit, pengawasan perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diverifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diverifikasi tanaman perkebunan,

- pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyak dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diverifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyak dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi bina budidaya perkebunan
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi bina budidaya perkebunan
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi bina budidaya perkebunan
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan pelayanan budidaya perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya	Makna Indikator : Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya merupakan pendukung dari indikator program prosentase lahan yang ditanami kelapa sawit dan karet indikasi peningkatan produksi perkebunan. Dengan semakin meningkatnya kelompok yang	Kepala Seksi Bina Budidaya Perkebunan	Data yang dikompilasi dari lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>mampu menangani OPT pada usaha taninya diharapkan produksi perkebunan akan meningkat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produksi dan produktivitas Perkebunan. Dengan jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya diharapkan tanaman bebas dari gangguan OPT sehingga akan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya dihitung dengan cara menghitung peningkatan jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			taninya tahun berjalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala		
2.	Melaksanakan pelayanan budidaya perkebunan	Jumlah luasan kebun diversifikasi	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah luasan kebun diversifikasi merupakan pendukung dari indikator program prosentase lahan yang ditanami kelapa sawit dan karet indikasi peningkatan produksi perkebunan. Dengan semakin meningkatnya kelompok yang melaksanakan perluasan kebun diversifikasi pada usaha taninya diharapkan produksi perkebunan akan meningkat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah luasan kebun diversifikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produksi dan produktivitas perkebunan. Dengan jumlah kelompok yang melaksanakan perluasan kebun diversifikasi pada usaha taninya diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas</p>	Kepala Seksi Bina Budidaya Perkebunan	Data yang dikompilasi dari lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>tanaman perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah luasan kebun diversifikasi dihitung dengan cara menghitung peningkatan jumlah kelompok yang melaksanakan perluasan kebun diversifikasi pada usaha taninya tahun berjalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala</p>		
3.	Melaksanakan pelayanan budidaya perkebunan	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi produksi pada usaha taninya	<p>Makna Indikator : Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi produksi pada usaha taninya merupakan indikator pendukung dari indikator program prosentase Lahan yang ditanami kelapa sawit dan karet indikasi peningkatan produksi perkebunan. Dengan semakin meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan teknologi produksi pada usaha taninya diharapkan produksi dan kualitas hasil produksi tanaman perkebunan akan meningkat</p>	Kepala Seksi Bina Budidaya Perkebunan	Data yang dikompilasi dari lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Jumlah luasan kebun diversifikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produksi dan produktivitas perkebunan. Tanpa penerapan teknologi yang tepat maka produksi perkebunan tidak akan optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produk. Dengan jumlah luasan kebun diversifikasi produksi pada usaha taninya diharapkan akan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah kelompok yang jumlah luasan kebun diversifikasi dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang telah menerapkan teknologi produksi pada usaha taninya pada tahun berjalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
4.	Melaksanakan pembinaan penggunaan bibit bersertifikat	Jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat merupakan indikator pendukung dari indikator program prosentase lahan yang ditanami kelapa sawit dan karet indikasi peningkatan produksi perkebunan. Dengan semakin meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat diharapkan produksi dan kualitas hasil produksi tanaman perkebunan akan meningkat</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produksi dan produktivitas perkebunan. Tanpa penerapan bibit bersertifikat maka produksi perkebunan tidak akan optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produksi. Dengan</p>	Kepala Seksi Bina Budidaya Perkebunan	Data yang dikompilasi dari lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat diharapkan akan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang telah menerapkan bibit bersertifikat pada usaha taninya pada tahun berjalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha perkebunan

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina usaha perkebunan yang meliputi program dan kegiatan bina usaha perkebunan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perkebunan
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina usaha perkebunan
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi bina usaha perkebunan

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi bina usaha perkebunan
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai usaha pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi bina usaha perkebunan
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan divesifikasi usaha	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan diversifikasi usaha merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kelompok tani mampu meningkatkan jenis usaha sektor perkebunannya melalui diversifikasi usaha</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan diversifikasi usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan pendapatan petani pekebun. Indikator ini mendukung indikator program prosentase peningkatan</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan	Data kompilasi dari laporan petugas lapangan/hasil crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>pemasaran produksi perkebunan</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan diversifikasi usaha dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang mampu melaksanakan diversifikasi usaha setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
2.	Melaksanakan peningkatan pemasaran produk olahan perkebunan	Jumlah kelompok yang dapat mengakses pasar	<p>Makna Indikator : Jumlah kelompok yang dapat mengakses pasar merupakan pendukung dari indikator program prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan indikasi peningkatan produksi perkebunan. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang dapat memasarkan produksi diharapkan akan meningkatkan meningkatnya produk olahan perkebunan</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan	Data kompilasi dari laporan petugas lapangan/hasil crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Jumlah kelompok yang dapat mengakses pasar merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan produk olahan perkebunan. Dengan kemampuan mengakses pasar diharapkan usaha perkebunan akan terus berkembang</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah kelompok yang dapat mengakses modal dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang dibina yang mampu mengakses pasar setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
3.	Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha perkebunan	Jumlah jenis produk olahan perkebunan yang dihasilkan	<p>Makna Indikator : Jumlah jenis produk olahan perkebunan yang dihasilkan merupakan pendukung dari indikator program prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan dan berkaitan dengan</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan	Data kompilasi dari laporan petugas lapangan/hasil crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>indikator sasaran SKPD indikasi peningkatan produksi perkebunan. Indikator ini merupakan indikator untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan yang sebelumnya produk yang dihasilkan hanya dalam bentuk satu jenis saja diharapkan akan meningkat menjadi produk olahan dengan beberapa varian yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah jenis produk olahan perkebunan yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah jenis produk olahan perkebunan yang dihasilkan dihitung dengan cara menghitung jumlah jenis yang mampu dihasilkan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
4.	Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunan	<p>Makna Indikator : Jumlah jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunan merupakan pendukung dari indikator program prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan dan berkaitan dengan indikator sasaran SKPD indikasi peningkatan produksi perkebunan. Indikator ini merupakan indikator untuk meningkatkan kualitas hasil dari produksi perkebunan yang sebelumnya produk yang dihasilkan hanya dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan diharapkan akan meningkat menjadi produk olahan yang</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan	Data kompilasi dari laporan petugas lapangan/hasil crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan nilai jual produksi sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selama ini produk perkebunan yang dijual petani masih dalam produk mentah dan dijual seadanya. Diharapkan kedepan pemasaran produk perkebunan sudah dengan tingkatan standarisasi tertentu diikuti dengan harga yang menyesuaikan</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunan dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunannya setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Bidang Produksi Peternakan**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dibidang produksi peternakan

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan produksi peternakan, yang meliputi program dan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perkebunan dan peternakan
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi perbibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perbibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang produksi peternakan

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perkebunan dan peternakan
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja, sesuai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan produksi peternakan
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya aktifitas perbibitan ternak	Prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan merupakan pendukung dari indikator kinerja utama meningkatnya aktifitas perbibitan ternak. Prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan merupakan prosentase dari kelompok peternak sapi yang melaksanakan Inseminasi Buatan (kawin suntik) di seluruh Kabupaten Barito Kuala</p>	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Data laporan kinerja seksi pembibitan dan pengembangan ternak

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan. Dengan penerapan Inseminasi Buatan diharapkan akan meningkatkan kelahiran ternak yang pada akhirnya akan meningkatkan populasi ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan dibagi dengan jumlah kelompok ternak sapi potong dikali 100% dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
2.	Terkendalinya pengeluaran bibit ternak	Prosentase ternak bibit yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	<p>Makna Indikator : Indikator ternak bibit yang memenuhi SNI merupakan pendukung dari indikator peningkatan populasi ternak. Indikator ini merupakan indikator untuk meningkatkan kualitas hasil dari produksi bibit ternak yang dihasilkan oleh kelompok pembibit ternak Sapi Bali di Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Alasan Pemilihan : Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah Sumber Bibit Sapi Bali di Indonesia. Indikator prosentase ternak bibit yang memenuhi SNI merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha perbibitan dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak Sapi Bali yang dihasilkan, karena hanya ternak bibit yang memenuhi SNI saja yang dapat dikategorikan sebagai bibit ternak. Disamping itu indikator</p>	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Data laporan kinerja seksi pembibitan dan pengembangan ternak

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>ini juga berfungsi untuk sampai sejauh mana kualitas bibit yang dihasilkan yang dapat dijadikan untuk menerbitkan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dan menentukan kebijakan selanjutnya</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator prosentase ternak bibit yang memenuhi SNI dihitung dengan cara menghitung jumlah ternak yang memenuhi SNI dibandingkan seluruh ternak bibit yang ada di Kabupaten Barito Kuala dikali 100%. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya usaha agribisnis peternakan	Prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan	<p>Makna Indikator : Indikator prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan merupakan indikator untuk menganalisa berapa persen jumlah usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator peningkatan usaha agribisnis peternakan merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi peternakan. Saat ini usaha agribisnis peternak terus mengalami peningkatan terutama untuk ternak besar dan ternak unggas. Pada dua komoditas ini pelaku usaha sudah mulai tertarik berinvestasi dengan beberapa pola bagi hasil</p>	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Data laporan kinerja seksi bina usaha peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan dihitung dengan cara menghitung peningkatan jumlah usaha agribisnis peternakan (pelaku usaha/kelompok tani yang beragribisnis peternakan) di Kabupaten Barito Kuala dibagi jumlah tahun lalu dikali 100%. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembibitan dan pengembangan ternak

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembibitan dan pengembangan ternak, yang meliputi program dan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang produksi peternakan
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pembibitan dan pengembangan ternak
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi pembibitan dan pengembangan ternak

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi pembibitan dan pengembangan ternak
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi pembibitan dan pengembangan ternak
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB)	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) merupakan pendukung dari indikator kinerja utama terjaganya stabilitas populasi ternak. Jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) merupakan jumlah sapi yang lahir dari hasil Inseminasi Buatan (kawin suntik) yang dilakukan oleh inseminator diseluruh Kabupaten Barito Kuala selama satu tahun</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB)</p>	Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan. Dengan diketahuinya jumlah ternak lahir hasil Inseminasi Buatan akan diperoleh beberapa data penting antara lain : data <i>Service per Conception</i> (S/C), jumlah betina produktif, populasi induk ternak dan kondisi kesehatan reproduksi ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Setiap pelaksanaan Inseminasi Buatan selalu dilaporkan baik secara manual maupun online (gateway) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian. Indikator jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) dihitung dengan cara menghitung jumlah</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan di seluruh Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		
2.	Melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah rata-rata <i>Calving Interval</i> (jarak antar kelahiran) ternak	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah rata-rata <i>Calving Interval</i> (jarak antar kelahiran) ternak merupakan pendukung dari indikator peningkatan populasi ternak. Jarak kelahiran ternak diketahui dengan mencatat kelahiran ternak n dan kelahiran ternak $n+1$ dari seekor induk. Indikator ini merupakan indikator untuk meningkatkan populasi ternak Sapi Bali Barito Kuala</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah Sumber Bibit Sapi Bali di Indonesia. Indikator Jumlah Rata-Rata <i>Calving Interval</i> (jarak antar kelahiran) ternak merupakan faktor yang sangat</p>	Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>penting dalam usaha perbibitan dalam rangka meningkatkan kuantitas ternak sapi bali yang dihasilkan, dengan memperpendek jarak kelahiran melalui Inseminasi Buatan diharapkan akan meningkatkan populasi ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah rata-rata <i>Calving Interval</i> (jarak antar kelahiran) ternak dihitung dengan cara menghitung jarak kelahiran individu ternak sapi n dan kelahiran $n+1$ yang ada di Kabupaten Barito Kuala/ seluruh kelahiran ternak. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
3.	Melaksanakan pembinaan perbibitan ternak	Jumlah kelompok yang menerapkan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP)	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP) merupakan indikator untuk menghitung berapa jumlah kelompok</p>	Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>di Kabupaten Barito Kuala yang telah melaksanakan GBP. Katagori pelaksanaan GBP dilakukan dengan indikasi telah melaksanakan pencatatan (<i>recording</i>) yang meliputi <i>recording</i> terhadap tanggal Inseminasi Buatan, kelahiran, berat lahir, sapih, panjang badan, tinggi gumba, lingkaran dada</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP) merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha perbibitan ternak dalam rangka meningkatkan populasi ternak. Tanpa ada pelaksanaan GBP maka ternak bibit yang dihasilkan tidak dapat dikategorikan sebagai bibit</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah kelompok yang menerapkan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP) dihitung dengan</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			cara menghitung jumlah kelompok yang melaksanakan GBP di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		
4.	Melaksanakan pembinaan perbibitan ternak	Jumlah sapi ber SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	<p><u>Makna Indikator :</u> Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) merupakan surat yang menyatakan bahwa individu ternak layak untuk dijadikan bibit. Indikator jumlah sapi ber SKLB merupakan indikator untuk menghitung berapa jumlah bibit ternak Sapi Bali yang dihasilkan di Kabupaten Barito Kuala. Untuk mencapai katagori ternak bibit dilakukan melalui proses GBP</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah sapi ber SKLB merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha perbibitan ternak. Indikator ini sebagai bahan evaluasi keberhasilan perbibitan ternak melalui ternak</p>	Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>yang layak sebagai bibit harus memiliki SKLB</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah ternak sapi ber SKLB dihitung dengan cara menghitung jumlah ternak sapi yang layak bibit dan memiliki SKLB di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha peternakan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina usaha peternakan yang meliputi program dan kegiatan bina usaha peternakan sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang produksi peternakan
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina usaha peternakan
c. Melaksanakan secara operasionalisasi bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan

- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi bina usaha peternakan
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi bina usaha peternakan
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi bina usaha peternakan
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal	<u>Makna Indikator :</u> Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal merupakan pendukung dari indikator program prosentase peningkatan produksi peternakan. Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal merupakan indikator untuk mengetahui berapa jumlah pelaku/kelompok peternak yang dapat mengakses permodalan baik perbankan maupun kerjasama dengan swasta. Dengan semakin	Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>banyaknya pelaku usaha yang dapat mengakses modal diharapkan akan meningkatkan luasan populasi dan produksi peternakan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peternakan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan. Karena tidak semua usaha peternakan dapat difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan peran pihak lain dalam rangka peningkatan populasi dan produksi peternakan</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal dihitung dengan cara menghitung jumlah pelaku usaha yang mampu mengakses modal setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
2.	Pembinaan teknologi tepat guna peternakan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk merupakan pendukung dari indikator program prosentase produk olahan yang memenuhi standar ASUH. Indikator ini merupakan indikator untuk mengetahui jumlah pelaku usaha/kelompok yang telah melakukan diversifikasi produk dari usaha ternaknya</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peternakan dalam rangka meningkatkan produksi peternakan. Indikator ini menunjukkan bahwa kedepan kita tidak hanya menghasilkan produk di sektor hulu tetapi sudah beralih ke arah semakin ke hilir dengan mengedepankan nilai tambah produk peternakan yang</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>dihasilkan</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk dihitung dengan cara menghitung jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
3.	Meningkatkan pembinaan pemasaran produk olahan peternakan	Jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan	<p>Makna Indikator : Jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan merupakan pendukung dari indikator program prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan dan berkaitan dengan indikator sasaran SKPD indikasi peningkatan produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar. Indikator ini merupakan indikator untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan yang sebelumnya produk yang dihasilkan hanya dalam bentuk</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>satu jenis saja diharapkan akan meningkat menjadi produk olahan dengan beberapa varian yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peternakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan dihitung dengan cara menghitung jumlah jenis yang mampu dihasilkan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
4.	Pembinaan teknologi tepat guna peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan	<p>Makna Indikator : Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan merupakan indikator yang mensukseskan dari indikator program prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan dan berkaitan dengan indikator sasaran SKPD indikasi peningkatan produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar. Indikator ini merupakan indikator untuk menilai sampai sejauh mana penerapan teknologi dilakukan ditingkat kelompok tani ternak</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peternakan dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan nilai tambah produksi sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan</p>	Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			peternak Perhitungan Indikator : Indikator jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan dihitung dengan cara menghitung jumlah kelompok yang telah menerapkan teknologi peternakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Jabatan : **Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
- Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Fungsi :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan
 - b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi kesehatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kesehatan hewan	Prosentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator prosentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak adalah indikator untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPD menangani kasus kejadian penyakit menular ternak, baik yang menular antar ternak maupun dari ternak ke manusia (zoonosis) di Kabupaten Barito Kuala</p>	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kinerja seksi kesehatan hewan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase penanganan kasus kejadian menular ternak merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha peningkatan produksi peternakan. Penanganan kasus kejadian penyakit menular ternak menjadi indikator tingkat keberhasilan pembangunan peternakan. Apabila kasus penyakit menular ternak tidak tertangani dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap populasi dan produksi peternakan</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Prosentase penanganan kasus kejadian penyakit menular ternak dilakukan dengan cara menghitung jumlah kejadian penyakit menular ternak yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus yang terjadi dikali 100%. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
2.	Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase produk olahan yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	<p>Makna Indikator : Indikator prosentase produk olahan yang memenuhi standar ASUH merupakan indikator untuk menghitung berapa persen jumlah produk olahan yang diproduksi di Kabupaten Barito Kuala yang telah memenuhi standar ASUH. Aman diartikan bahwa produk olahan aman untuk dikonsumsi, sehat diartikan bahwa produk olahan tersebut bebas dari bakteri atau organisme berbahaya dan menyehatkan, Utuh diartikan produk olahan tersebut utuh tanpa dicampur dengan produk</p>	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kinerja seksi kesehatan masyarakat veteriner

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>lain, halal diartikan bahwa produk olahan harus berasal dari proses penyembelihan yang memenuhi standar halal. Hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan pangan asal ternak yang beredar aman dan layak konsumsi</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator prosentase produk olahan yang memenuhi standar ASUH merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha pengolahan produk peternakan dalam rangka meningkatkan produksi peternakan. Produk olahan peternakan apapun yang dihasilkan haruslah memenuhi standar ASUH sebagai jaminan keamanan pangan asal ternak yang diproduksi</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Prosentase produk olahan yang memenuhi standar ASUH dihitung dengan cara menghitung jumlah produk olahan peternakan yang memenuhi standar ASUH dibagi dengan seluruh produk olahan peternakan yang beredar di pasar di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Kesehatan Hewan**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan hewan

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan hewan yang meliputi program dan kegiatan kesehatan hewan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan hewan
c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan *surveilans* penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan *surveilans* penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan *surveilans* penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit

- hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan *surveilans* penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kesehatan hewan
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kesehatan hewan
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kesehatan hewan
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan pengamatan penyakit hewan	Jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit hewan	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit hewan merupakan indikator untuk menilai kinerja pencegahan penyakit menular ternak</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit</p>	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>hewan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pencegahan dini penyakit menular ternak. Dengan terdeteksinya penyakit menular maka akan mempermudah tindakan selanjutnya agar kejadian kasus penyakit menular ternak dapat ditekan serendah mungkin</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit hewan dihitung dengan cara menghitung jumlah kejadian penyakit menular ternak yang dapat dideteksi melalui kegiatan pengambilan specimen dan bahan lain yang diperlukan. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
2.	Melaksanakan penyidikan penyakit hewan	Jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit hewan	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit hewan merupakan indikator untuk menilai kinerja pencegahan</p>	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>penyakit menular ternak melalui penyidikan terhadap suatu kasus penyakit</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit hewan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pencegahan dini penyakit menular ternak. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengamatan penyakit hewan. Dengan teridentifikasi penyakit menular maka akan mempermudah tindakan selanjutnya agar kejadian kasus penyakit menular ternak dapat ditekan serendah mungkin</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit hewan dihitung dengan cara menghitung jumlah hewan yang terdeteksi terserang penyakit pada suatu kejadian. Dihitung setiap tahun</p>		lapangan/hasil pemeriksaan laboratorium

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		
3.	Melaksanakan tindakan pencegahan penyakit menular ternak	Rasio ternak sehat	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator rasio ternak sehat merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan pencegahan dan penanganan penyakit menular ternak</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator rasio ternak sehat merupakan faktor yang untuk menilai keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak. Dengan diketahuinya rasio ternak sehat akan diketahui seberapa besar keberhasilan kinerja pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Indikator rasio ternak sehat dihitung dengan cara menghitung jumlah ternak yang sehat (tidak terserang penyakit) dibagi total jumlah populasi ternak</p>	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			di Kabupaten Barito Kuala dikali 100%. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		
4.	Melaksanakan pemberantasan penyakit menular ternak	Penurunan kasus kejadian penyakit ternak	<p>Makna Indikator : Indikator penurunan kasus kejadian penyakit ternak merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan pencegahan dan penanganan penyakit menular ternak. Kinerja dianggap berhasil jika telah terjadi penurunan kejadian penyakit atau bahkan <i>zero case</i></p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator penurunan kasus kejadian penyakit ternak merupakan faktor yang untuk menilai keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak. Dengan diketahuinya penurunan kasus kejadian penyakit ternak akan diketahui seberapa besar keberhasilan kinerja pencegahan dan penanggulangan penyakit</p>	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>menular ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator penurunan kasus kejadian penyakit ternak dihitung dengan cara menghitung jumlah kejadian penyakit hewan dikurangi dengan kejadian periode sebelumnya di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

Jabatan : **Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Tugas : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner

Fungsi : a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi program dan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan masyarakat veteriner
c. Melaksanakan secara operasionalisasi pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya)
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil

- pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya)
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya)
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kesehatan masyarakat veteriner

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kesehatan masyarakat veteriner
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kesehatan masyarakat veteriner
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat vetriner	Jumlah kejadian penyakit zoonosis yang ditangani	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah kejadian penyakit zoonosis yang ditangani adalah indikator untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPD menangani kasus kejadian penyakit zoonosis, di Kabupaten Barito Kuala</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah penanganan kasus kejadian penyakit zoonosis yang ditangani merupakan indikator yang sangat penting dalam usaha peningkatan produksi peternakan dan keamanan produk peternakan. Penanganan kasus kejadian penyakit zoonosis menjadi</p>	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>indikator tingkat keberhasilan pembangunan peternakan. Apabila kasus penyakit zoonosis tidak tertangani dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap populasi dan produksi peternakan serta keamanan pangan asal ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Jumlah penanganan kasus kejadian penyakit zoonosis dilakukan dengan cara menghitung jumlah kejadian penyakit zoonosis yang terjadi selama periode tertentu. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
2.	Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah ternak yang terdeteksi dini penyakit zoonosis	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit zoonosis merupakan indikator untuk menilai kinerja pencegahan penyakit zoonosis baik antar ternak maupun dari ternak ke manusia</p>	Kepala Seksi Masyarakat Veteriner	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan/hasil pemeriksaan laboratorium

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit zoonosis merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pencegahan dini penyakit menular ternak. Dengan terdeteksinya penyakit zoonosis maka akan mempermudah tindakan selanjutnya agar kejadian kasus penyakit zoonosis dapat ditekan serendah mungkin dan tidak terjadi penularan ke manusia baik melalui ternak maupun melalui produk peternakan ke manusia</p> <p><u>Perhitungan Indikator :</u> Indikator jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit zoonosis dihitung dengan cara menghitung jumlah kejadian penyakit zoonosis yang dapat dideteksi melalui kegiatan pengambilan specimen dan bahan lain yang diperlukan. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
3.	Melaksanakan pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan	Jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Hewan	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di RPH merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan jumlah pemantauan keamanan pangan asal ternak melalui pemeriksaan dan pemantauan perlakuan kesejahteraan hewan sebelum dan pada saat pemotongan ternak</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di RPH merupakan faktor yang untuk menilai apakah ternak yang akan dipotong diperlakukan secara benar. Hal ini akan terkait dengan hasil daging yang akan diperoleh berkualitas baik dan atau tidak sehingga diperlukan indikator ini. Pemeriksaan ini menjadi sangat penting mengingat akan berpengaruh terhadap kualitas pangan asal ternak</p>	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di RPH dihitung dengan cara menghitung jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewannya pada saat sebelum maupun pada saat pemotongan di RPH di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		
4.	Melaksanakan pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan	Jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas	<p>Makna Indikator : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan jumlah pemantauan keamanan pangan asal ternak melalui pemeriksaan dan pemantauan perlakuan kesejahteraan hewan sebelum dan pada saat pemotongan ternak</p>	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Alasan Pemilihan : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas merupakan faktor yang untuk menilai apakah ternak yang akan dipotong diperlakukan secara benar. Hal ini akan terkait dengan hasil daging yang akan diperoleh berkualitas baik dan atau tidak sehingga diperlukan indikator ini. Pemeriksaan ini menjadi sangat penting mengingat akan berpengaruh terhadap kualitas pangan asal ternak</p> <p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas dihitung dengan cara menghitung jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewannya pada saat sebelum maupun pada saat pemotongan di RPH di Kabupaten Barito</p>		

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun		
5.	Melaksanakan pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan	Jumlah pemeriksaan pemotongan ternak	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator jumlah pemeriksaan pemotongan ternak merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan jumlah pemantauan keamanan pangan asal ternak melalui pemeriksaan pemotongan ternak</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator jumlah pemeriksaan pemotongan ternak merupakan faktor yang untuk menilai keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular zoonosis dan keamanan pangan asal ternak. Pemeriksaan ini menjadi sangat penting mengingat akan berpengaruh terhadap kualitas pangan asal ternak</p>	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hasil kompilasi laporan petugas lapangan dan crosscheck lapangan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
			<p>Perhitungan Indikator : Indikator jumlah pemeriksaan pemotongan ternak dihitung dengan cara menghitung jumlah pemeriksaan terhadap pemotongan ternak di Kabupaten Barito Kuala. Dihitung setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun</p>		

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**TARGET KINERJA ESELON II
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Pertanian	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.		Meningkatnya populasi dan produksi peternakan	Prosentase peningkatan populasi peternakan	Pertanian	2,69 %	2,69 %	2,36 %	2,55 %	2,69 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Prosentase peningkatan produksi daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Pertanian	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.		Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan	Prosentase peningkatan produk olahan perkebunan yang diterima pasar	Pertanian	50,00 %	33,33 %	25,00 %	20,00 %	16,67 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Prosentase peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar	Pertanian	50,00 %	33,33 %	12,50 %	11,11 %	10,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**TARGET KINERJA ESELON III
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Meningkatnya produktivitas perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	Pertanian	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	Bidang Perkebunan
		Meningkatnya pengendalian hama penyakit	Prosentase Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang diselesaikan	Pertanian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Perkebunan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya populasi dan produksi peternakan	Meningkatnya aktifitas perbibitan ternak	Prosentase kelompok yang menerapkan Inseminasi Buatan	Pertanian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Produksi Peternakan
		Terkendalinya pengeluaran bibit ternak	Prosentase ternak bibit yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Pertanian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Produksi Peternakan
		Meningkatnya kesehatan hewan	Prosentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak	Pertanian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah peningkatan produksi daging ternak yang ASUH	Pertanian	1.934.053 kg	2.050.636 kg	1.850.000 kg	1.950.000 kg	2.100.000 kg	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan	Meningkatnya kemampuan kelompok dalam akses pasar	Prosentase peningkatan pemasaran produksi perkebunan	Pertanian	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	Bidang Perkebunan
		Meningkatnya usaha agribisnis peternakan	Prosentase peningkatan usaha agribisnis peternakan	Pertanian	10,00 %	10,00 %	8,00 %	6,00 %	6,00 %	Bidang Produksi Peternakan

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 19671124 198803 1 005

Lampiran. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/030/Disbunnak/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

**TARGET KINERJA ESELON IV
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Melaksanakan pelayanan budidaya perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT pada usaha taninya	Pertanian	4 paktan	5 paktan	6 paktan	8 paktan	10 paktan	Seksi bina budidaya perkebunan
			Jumlah luasan kebun diversifikasi	Pertanian	40 Ha	50 Ha	60 Ha	70 Ha	80 Ha	Seksi bina budidaya perkebunan
		Melaksanakan pembinaan penggunaan bibit bersertifikat	Jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat	Pertanian	20 paktan	22 paktan	24 paktan	26 paktan	30 paktan	Seksi bina budidaya perkebunan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan diversifikasi usaha	Pertanian	2 poktan	4 poktan	6 poktan	8 poktan	10 poktan	Seksi bina usaha perkebunan
			Jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu hasil perkebunan	Pertanian	2 poktan	3 poktan	4 poktan	5 poktan	6 poktan	Seksi bina usaha perkebunan
			Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi produksi pada usaha taninya	Pertanian	25 poktan	30 poktan	35 poktan	40 poktan	45 poktan	Seksi bina budidaya perkebunan
		Melaksanakan peningkatan pemasaran produk olahan perkebunan	Jumlah kelompok yang dapat mengakses pasar	Pertanian	6 poktan	6 poktan	7 poktan	8 poktan	8 poktan	Seksi bina usaha perkebunan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya populasi dan produksi peternakan	Melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan (IB)	Pertanian	800 ekor	850 ekor	550 ekor	650 ekor	750 ekor	Seksi pembibitan dan pengembangan ternak
			Jumlah rata-rata <i>Calving Interval</i> (jarak antar kelahiran) ternak	Pertanian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Seksi pembibitan dan pengembangan ternak
		Melaksanakan pembinaan perbibitan ternak	Jumlah kelompok yang menerapkan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP)	Pertanian	23 poktan	26 poktan	28 poktan	30 poktan	32 poktan	Seksi pembibitan dan pengembangan ternak
			Jumlah sapi ber SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	Pertanian	500 ekor	500 ekor	550 ekor	600 ekor	700 ekor	Seksi pembibitan dan pengembangan ternak
		Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha yang dapat mengakses modal	Pertanian	55 pelaku usaha	60 pelaku usaha	64 pelaku usaha	67 pelaku usaha	70 pelaku usaha	Seksi bina usaha peternakan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Melaksanakan pembinaan teknologi tepat guna peternakan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk	Pertanian	50 pelaku usaha	55 pelaku usaha	57 pelaku usaha	60 pelaku usaha	63 pelaku usaha	Seksi bina usaha peternakan
			Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan	Pertanian	10 poktan	15 poktan	17 poktan	20 poktan	23 poktan	Seksi bina usaha peternakan
		Melaksanakan pengamatan penyakit hewan	Jumlah ternak yang terdeteksi dini terserang penyakit hewan	Pertanian	50 ekor	50 ekor	25 ekor	50 ekor	50 ekor	Seksi kesehatan hewan
		Melaksanakan penyidikan penyakit hewan	Jumlah sampel penyakit hewan yang diperiksa	Pertanian	50 ekor	150 ekor	50 ekor	200 ekor	200 ekor	Seksi kesehatan hewan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Melaksanakan tindakan pencegahan penyakit menular ternak	Rasio ternak sehat	Pertanian	1	1	1	1	1	Seksi kesehatan hewan
			Jumlah hewan yang divaksin penyakit hewan menular	Pertanian	1.500 ekor	1.750 ekor	1.000 ekor	1.750 ekor	2.000 ekor	Seksi kesehatan hewan
		Melaksanakan pemberantasan penyakit menular ternak	Jumlah penurunan kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pertanian	4 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus	0 kasus	Seksi kesehatan hewan
		Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah kejadian penyakit zoonosis yang ditangani	Pertanian	100 ekor	100 ekor	25 ekor	25 ekor	50 ekor	Seksi kesehatan masyarakat veteriner

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah ternak yang terdeteksi dini penyakit zoonosis	Pertanian	50 ekor	50 ekor	0 ekor	10 ekor	50 ekor	Seksi kesehatan masyarakat veteriner
		Melaksanakan pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan	Jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Hewan	Pertanian	96 ekor	96 ekor	100 ekor	145 ekor	150 ekor	Seksi kesehatan masyarakat veteriner
			Jumlah ternak yang diawasi kesejahteraan hewan di Rumah Potong Unggas/ Tempat Pemotongan Unggas	Pertanian	500 ekor	500 ekor	250 ekor	250 ekor	500 ekor	Seksi kesehatan masyarakat veteriner
			Jumlah pemeriksaan pemotongan ternak	Pertanian	100 sampel	100 sampel	100 sampel	100 sampel	100 sampel	Seksi kesehatan masyarakat veteriner

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Target Kinerja (%)					Unit Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran Kinerja			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan	Melaksanakan peningkatan pemasaran produk olahan perkebunan	Jumlah jenis produk olahan perkebunan yang dihasilkan	Pertanian	3 jenis	4 jenis	5 jenis	6 jenis	7 jenis	Seksi bina usaha perkebunan
		Meningkatkan pembinaan pemasaran produk olahan peternakan	Jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan	Pertanian	6 jenis	8 jenis	9 jenis	10 jenis	11 jenis	Seksi bina usaha peternakan

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

H. SUWARTONO SUSANTO, SP, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19671124 198803 1 005